

LAPORAN TAHUNAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



WEB PORTAL INFORMASI PUBLIK JAWA TENGAH SEBAGAI MODEL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT

Tahun ke 1 (satu) dari rencana 2 (dua) tahun

TIM PENGUSUL :

Ketua

Budi Widjajanto, M.Kom (NIDN 0618097101)

Anggota

Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng (NIDN 0628075602)

Nova Rijati, S.Si., M.Kom. (NIDN 0622117201)

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
NOVEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Web Portal Informasi Publik Jawa Tengah Sebagai Model Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : BUDI WIDJAJANTO M.Kom.
NIDN : 0618097101
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Sistem Informasi
Nomor HP : 081325873525
Surel (e-mail) : budipojok@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : YULIMAN PURWANTO
NIDN : 0628075602
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : NOVA RIJATI S.Si., M.Kom.
NIDN : 0622117201
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 112.995.250,00

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Komputer



(Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo)
NIP/NIK 0686111992019

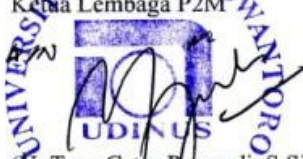


Semarang, 26 - 11 - 2013,
Ketua Peneliti,




(BUDI WIDJAJANTO M.Kom.)
NIP/NIK

Menzujui,
Ketua Lembaga P2M



(Y. Tyas Catir Pramudi, S.Si., M.Kom.)
NIP/NIK 0686111994046



RINGKASAN

WEB PORTAL INFORMASI PUBLIK JAWA TENGAH SEBAGAI MODEL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT, Budi Widjanto, Yuliman Purwanto, Nova Rijati, 56 halaman.

Tujuan dari penelitian tahun pertama ini adalah menghasilkan suatu model tatakelola TI untuk pelayanan informasi publik Jawa Tengah, yang sesuai ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Target penelitian adalah memetakan kondisi layanan publik pada website pemerintah dan menyusun model layanan informasi publik berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode *action research*. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi layanan-layanan pada website pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dengan cara studi pustaka/dokumentasi dan observasi website Kabupaten Wonogiri, Cilacap, Kudus, Semarang, Pekalongan dan Kebumen berdasarkan tingkatan *e-government*, kualitas konten informasi dan ketersediaan konten informasi pada website berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melakukan diskusi terarah dengan pihak-pihak yang terkait. Dan berdasarkan peta layanan informasi publik kemudian dirumuskan suatu model layanan informasi publik berbasis teknologi informasi berdasarkan pemetaan kondisi pelayanan publik

Hasilnya dari 6 website pemerintah Kabupaten, layanan situs masih bersifat informatif dan didukung dengan konten informasi yang berkualitas (akurat, terkini dan relevan), serta kersediaan konten-konten informasi publik pada situs pemerintah berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 sebesar 43%, sehingga diperlukan peningkatan layanan atau fungsi pada situs pemerintah menjadi interaktif dengan menambah konten-konten informasi publik dalam bentuk web portal agar sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci : informasi publik, teknologi informasi, *e-government*

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul “WEB PORTAL INFORMASI PUBLIK JAWA TENGAH SEBAGAI MODEL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT”

Berkat bantuan dari berbagai pihak baik pada saat persiapan, masa penelitian, pembahasan maupun pada saat penyusunan Laporan Tahunan Penelitian ini, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom. selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami untuk mengembangkan diri dalam kegiatan penelitian memenuhi unsure Tri Darma Perguruan Tinggi
2. Bapak Dr. Abdul Syukur, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan dorongan kepada kami selaku dosen untuk selalu meningkatkan produktivitas penelitian.
3. Bapak Ketua LP2M beserta staffnya yang telah memberikan banyak dukungan teknis, fasilitas, administrasi guna kelancaran penelitian.
4. Pengelola Website Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen beserta segenap timnya yang telah berkenan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Teman-teman dosen, khususnya dari Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan serta dorongan kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya kami berharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna perbaikan, penyempurnaan sampai kami dapat melanjutkan penelitian tahun kedua.

Semarang, November 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 State of The Art	3
2.2 <i>E-Government</i>	4
2.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	6
2.4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003	9
2.5 UUD 45 Pasal 28F	10
2.6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2007	10
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1 Tujuan Penelitian	12
3.2 Manfaat Penelitian	12
BAB 4. METODE PENELITIAN	
4.1 Populasi dan Sampel Penelitian	13
4.2 Data dan Sumber Data	14
4.3 Metode Pengumpulan Data	14
4.4 Metode Analisis Data	14
4.5 Kerangka Penelitian	15
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pemetaan Kondisi Layanan Publik pada Website Pemerintah	17
5.1.1 Kajian UU dan Penerapan tentang Penerapan E-Government	17
5.1.2 Analisis Penelitian Terdahulu	26
5.2 Analisis Observasi Website Pemerintah	28

5.2.1	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Wonogiri	28
5.2.2	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Pekalongan	29
5.2.3	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Cilacap	33
5.2.4	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Kudus	35
5.2.5	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Semarang	41
5.2.6	Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Kebumen	42
5.3	Hasil Analisis Layanan Website Berdasarkan Tingkatan E-Government	45
5.4	Hasil Analisis Kualitas Konten Informasi	46
5.5	Hasil Analisis Ketersediaan Konten Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	47
5.6	Perancangan Web Portal	49
5.6.1	Perancangan Kanal Informasi Publik	50
5.6.2	Perancangan Konten Kanal Portal Informasi Publik	52
5.6.3	Perancangan Layanan Portal Informasi Publik	52
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA		54
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN		
7.1	Kesimpulan	55
7.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Peneliti		57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran Penelitian	16
Gambar 2	Akses Web Portal Informasi Publik	50
Gambar 3	Rancangan Kanal-Kanal Informasi Publik	51
Gambar 4	Rancangan Konten Informasi Publik	52
Gambar 5	Model Layanan Informasi Publik	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peta Situs Kabupaten Wonogiri	28
Tabel 2 Peta Situs Kabupaten Pekalongan	29
Tabel 3 Peta Situs Kabupaten Cilacap	33
Tabel 4 Peta Situs Kabupaten Kudus	35
Tabel 5 Peta Situs Kabupaten Semarang	41
Tabel 6 Peta Situs Kabupaten Kebumen	42
Tabel 7 Menu Website Pemerintah	45
Tabel 8 Jenis Layanan Website Berdasarkan Tingkatan E-Government	45
Tabel 9 Layanan Website Berdasarkan Kualitas Konten Informasi	46
Tabel10 Layanan Website Berdasarkan Ketersediaan Konten Informasi sesuai UU 14/2008	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik [1]. Untuk mewujudkan misi *good governance* ini, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) [2] dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 [3]. Selanjutnya secara resmi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2010. Tujuan diterapkannya undang-undang tersebut antara lain untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Sehingga Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 3 UU 14/2008.

Namun dalam kenyataannya pengembangan sistem informasi oleh badan publik atau yang dikenal dengan sebutan e-Government negara Republik Indonesia, masih jauh dari harapan masyarakat [4], bahwa mayoritas website pemerintah yang dapat diakses masih digunakan untuk sarana publikasi informasi pemerintah secara on-line, walaupun ada yang menyediakan menu layanan publik, hanya bersifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur pelayanan. Fakta ini diperkuat oleh hasil survei United Nations E-Government Survey Releases 2012 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara.

Artinya diperlukan suatu terobosan khusus guna menjembatani gap antara kondisi website pemerintah yang masih berada dalam tingkatan menyediakan informasi dengan amanat undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menyediakan sistem layanan publik yang terintegrasi adalah dengan membangun website dengan satu pusat layanan (*one-stop centre* atau *one-stop shop*) seperti yang sudah diterapkan pada negara – negara maju [5]. Pemanfaatan e-Government untuk pelayanan informasi publik telah diimplementasikan oleh Pemerintah Romania [6]

bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Sedangkan strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (one-stop centre) [7], yang terdiri dari empat tahap pengembangan yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horizontal.

Dalam konteks menyediakan akses dan layanan informasi publik sesuai amanah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan portal informasi publik yang menyediakan layanan one-stop centre yang mampu mengintegrasikan layanan informasi publik dari berbagai badan publik serta menyediakan akses dan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemetaan layanan informasi publik pada website pemerintah/badan publik ?
2. Bagaimana menyusun model tata kelola teknologi informasi untuk pelayanan informasi publik yang sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Portal-portal e-Government yang terbaik merupakan situs pemerintah yang informatif, komprehensif dan efektif, terintegrasi dengan kuat, mampu memuat informasi yang luar biasa besar, menyediakan fitur yang lengkap dan memanfaatkan semua teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan oleh Sutrisno dan Istiyanto [5] dalam penelitiannya yang berjudul Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia. United Nations E-Government Survey Releases 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland.

Keberhasilan Pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan e-Government telah dianalisis oleh Chan, Lau, Pan [8] dalam penelitian yang berjudul “E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keberhasilan e-Government Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yakni :(i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur e-government, dan (iv) promosi e-government.

Pemanfaatan e-Government untuk pelayanan informasi publik telah diimplementasikan oleh Pemerintah Romania, seperti diungkapkan oleh Banciu [6] dalam penelitiannya yang berjudul “e-Romania – A Citizens’ Gateway towards Public Information”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Portal e-Romania merupakan sistem yang menghubungkan serta mengumpulkan informasi dari berbagai departemen, dimana departemen-departemen tersebut merupakan penanggung jawab konten informasi melalui domain / sub-domain masing-masing sebagaimana diatur dalam portal e-Romania. Ada delapan tahap dalam pengembangan portal e-Romania, yakni : menentukan struktur portal ; identifikasi portal-portal resmi yang sudah ada ; menentukan struktur portal yang terhubung ; menetapkan kategori data untuk tingkat nasional ; menetapkan struktur konten informasi; menetapkan cara mengakses

informasi ; memperkirakan volume informasi serta sumber daya yang dibutuhkan ; memastikan keamanan sistem.

Sedangkan penelitian yang memaparkan tentang strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (one-stop centre) dilakukan oleh Heng & Jinchang [7] dengan judul “An Integrated Approach to Developing a Succesfull One-Stop Portal e-Government”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi sistem layanan publik yang terintegrasi membutuhkan strategi yang koheren yang dimulai dengan kemauan politik yang kuat oleh pemerintah, ketersediaan sumber daya, peraturan-peraturan pendukung serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang disediakan. Ada empat tahap dalam pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi, yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horizontal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada penelitian ini dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 14/2008 serta Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa website e-Government, dapat ditindak lanjuti dengan membangun web portal layanan informasi publik yang terintegrasi dengan menerapkan konsep one-stop center dalam menyediakan akses dan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana. Kategori layanan dan informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui web portal informasi publik dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

2.2 E-Government

E-Government sering disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-*

government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Secara sederhana *Heeks* dalam membagi pengertian *E-Government* ke dalam lima tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi.

1. Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan *E-Government* untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai *website* yang cantik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, *E-Government* tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *E-Government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *Good Governance*.
2. Tingkat kedua dari *E-Government*, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar tagihan listrik, memperpanjang KTP, dan lain-lain. Semuanya dapat dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa institusi dipusat maupun di daerah. Kabupaten Takalar merupakan salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap terhadap masyarakatnya. Komunikasi duaarah antara institusi pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjalin secara online.
3. Level ketiga dari *E-Government*, memerlukan kerja sama (kolaborasi) secara online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP-nya untuk mengurus Pasport atau membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerja sama antara Kantor Kelurahan yang mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Pasport atau Kantor Polisi yang mengeluarkan SIM.
4. Level keempat dari *E-Government* sudah semakin kompleks. Bukan hanya memerlukan kerja sama antarinstansi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level ini, seseorang bisa

mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu database milik pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Pasport dan lain-lainnya ter-*update*.

5. Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (*packaged information*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “*informationpush*” yang berorientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, *E-Government* pada level lima ini mampu menyediakannya.

2.3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008

1. Pasal 1

Ayat 1 : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Ayat 2 : Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat 3 : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, egera tive, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan egera, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Pasal 7

- Ayat 1 : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- Ayat 2 : Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Ayat 3 : Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- Ayat 4 : Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- Ayat 5 : Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- Ayat 6 : Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

3. Pasal 9

- Ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- Ayat 2 : Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Ayat 3 : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- Ayat 4 : Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Ayat 5 : Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

Ayat 6 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

4. Pasal 10

Ayat 1 : Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

5. Pasal 11

Ayat 1: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

2.4 Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-government? Dalam lampiran Inpres E-government, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain :

- Strategi 1 : mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
- Strategi 2 : menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
- Strategi 3 : memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
- Strategi 4 : meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
- Strategi 5 : mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

Strategi 6 : melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia. Menurut Menkominfo, Syamsul Muarif, masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri.

2.5 UUD 45 Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2.6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan ini menjelaskan lima prinsip dasar yang menjadi pondasi bangunan Tata Kelola TIK Nasional. Prinsip ini mendasari model dan tingkat kedalaman implementasi model.

Prinsip 1 : Perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal institusi dan nasional. Memastikan bahwa setiap inisiatif selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun sebelumnya; dan memastikan bahwa rencana-rencana institusi di semua level pemerintahan, sinergis dan konvergen dengan rencana nasional.

Prinsip 2 : Penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab TIK yang jelas di level internal institusi dan nasional. Memastikan bahwa setiap institusi memahami dan menerima posisi dan tanggung jawabnya dalam peta TIK nasional secara umum, dan memastikan bahwa seluruh entitas fungsional di setiap institusi memahami dan menerima perannya dalam pengelolaan TIK di institusinya masing-masing.

Prinsip 3 : Pengembangan dan/atau akuisi TIK secara valid. Memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi TIK didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat; berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. Memastikan bahwa dalam setiap

pengembangan dan/atau akuisisi TIK selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko-risiko.

- Prinsip 4 : Memastikan operasi TIK berjalan dengan baik, kapan pun dibutuhkan Memastikan kesesuaian TIK dalam mendukung institusi, responsif atas perubahan kebutuhan kegiatan institusi, dan memberikan dukungan kepada kegiatan institusi di semua waktu yang dibutuhkan institusi.
- Prinsip 5 : Memastikan terjadinya perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia Memastikan bahwa penetapan: tanggung jawab, perencanaan, pengembangan dan/ atau akuisisi, dan operasi TIK selalu dimonitor dan dievaluasi kinerjanya dalam rangka perbaikan berkesinambungan (continuous improvement). Memastikan bahwa siklus perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) dilakukan dengan memperhatikan manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun web portal informasi publik Jawa Tengah sebagai model layanan informasi publik yang terintegrasi, yang dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan penelitian tahun pertama adalah menghasilkan suatu model tata kelola TI untuk pelayanan informasi publik Jawa Tengah, yang diperoleh dengan cara :

1. Memetakan layanan informasi publik pada website pemerintah/badan publik
2. Menyusun model layanan informasi publik berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat :

1. Teridentifikasinya kondisi layanan publik pada website pemerintah/badan publik.
2. Menghasilkan model layanan informasi publik berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *action research*. Pada tahun pertama ini akan dilakukan kajian (*research*) terhadap model tata kelola TI pada layanan publik yang sudah dilaksanakan dan kemudian berdasarkan kajian itu merumuskan suatu model tata kelola TI untuk pelayanan informasi publik, yang kemudian pada tahun kedua akan dilaksanakan tindakan (*action*) untuk menerapkan model yang sudah diperoleh pada tahun pertama yang diimplementasikan dalam bentuk web portal pelayanan informasi publik Jawa Tengah.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pada tahap pertama adalah untuk menghasilkan suatu model tata kelola TI untuk pelayanan informasi publik Jawa Tengah.

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah website pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Mengingat keterbatasan sumber daya (biaya, tenaga dan waktu) maka dari populasi tersebut kemudian akan dipilih sampel penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dengan terminologi pemilihan sampel sebagai berikut : Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 pemerintah Kabupaten dan 6 pemerintah Kota. Tiap pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Kota memiliki situs website resmi yang di gunakan sebagai salah satu media untuk penyampaian informasi secara berkala. Kemudian 29 pemerintah Kabupaten dan 6 pemerintah Kota terbagi kembali menjadi lebih khusus ke dalam pembagian administratif dalam sebuah provinsi Jawa Tengah yaitu 6 Karesidenan, yakni : Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Semarang dan Karesidenan Surakarta. Tiap Karesidenan tersebut di ambil 1 data sampel secara acak. Sehingga total ada 6 sampel website pemerintah Kabupaten atau pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah yang di analisis. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sampel 1 Website Kabupaten Wonogiri mewakili Karesidenan Surakarta
2. Sampel 2 Website Kabupaten Cilacap mewakili Karesidenan Banyumas
3. Sampel 3 Website Kabupaten Pekalongan mewakili Karesidenan Pekalongan
4. Sampel 4 Website Kabupaten Kudus mewakili Karesidenan Pati
5. Sampel 5 Website Kabupaten Semarang mewakili Karesidenan Semarang
6. Sampel 6 Website Kabupaten Kebumen mewakili Karesidenan Kedu

4.2 Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah peta situs, jenis layanan serta konten informasi dari website Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Semarang

4.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik pengumpulannya dilakukan melalui beberapa langkah yakni:

- a. Data primer adalah peta situs dan konten informasi diperoleh melalui : observasi, dilakukan dengan cara mengakses serta mengeksplorasi tiap menú atau link yang terdapat pada situs
- b. Data sekunder adalah kualitas konten informasi, jenis layanan serta kandungan informasi publik dalam website. Data sekunder diperoleh melalui:

1. Studi dokumentasi

Adalah dengan mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan informasi publik sebagai bahan untuk melengkapi data primer

2. Akses internet / *literature*

Akses internet digunakan untuk mencari data-data pendukung dari berbagai buku, e-book, maupun jurnal-jurnal yang disediakan di internet.

4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yakni dengan melakukan pemetaan menu-menu pada situs berdasarkan jenis layanan e-gov, penilaian kualitas konten informasi situs dari segi : akurasi, kekinian serta relevansi kemudian memetakan konten informasi dengan persyaratan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mewujudkan hasil tersebut maka kegiatan utama akan dilaksanakan dalam dua langkah yakni :

1. Memetakan kondisi layanan publik pada website pemerintah.

Bertujuan untuk mengidentifikasi layanan-layanan pada website Pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

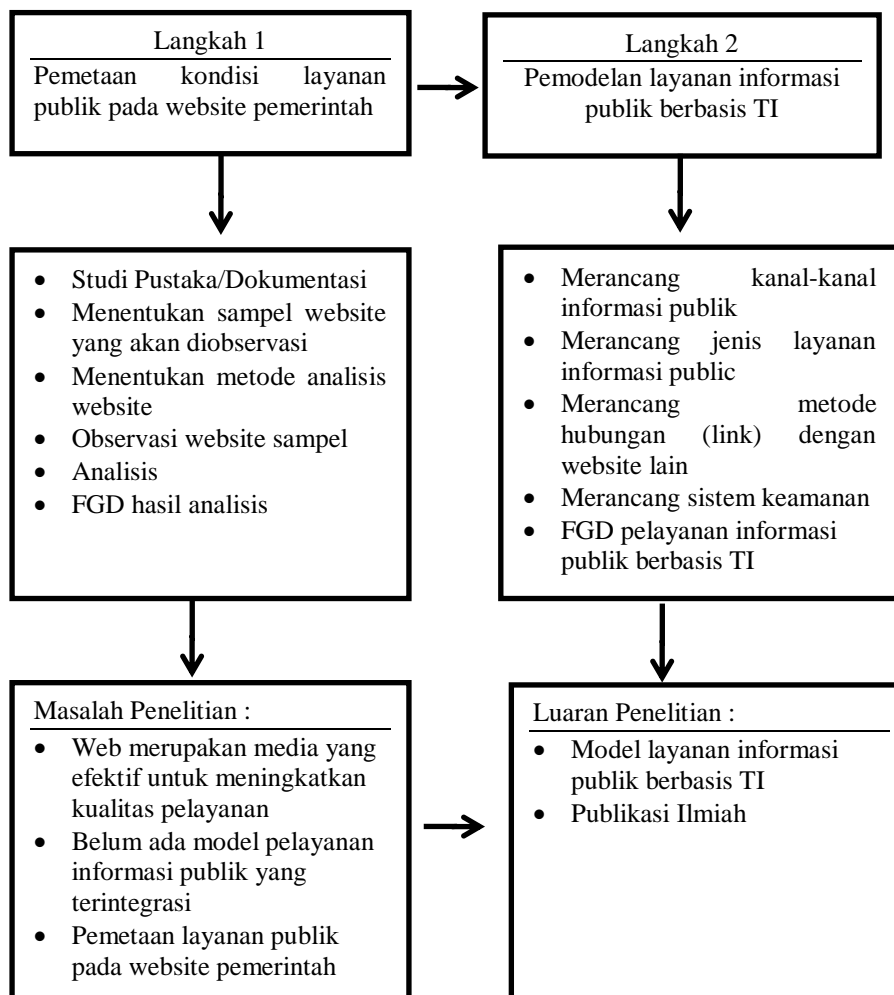
1. melakukan studi pustaka dan studi dokumentasi dengan cara mengkaji Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang penerapan e-government di lingkungan pemerintah, Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan-Peraturan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 serta hasil-hasil penelitian terdahulu ;
2. menentukan sampel website yang akan diobservasi dengan metode purposive random sampling.
3. melakukan analisis website yang diobservasi dengan cara : membuat peta website (site map)
4. menganalisis layanan website berdasarkan tingkatan e-government
5. menganalisis kualitas konten informasi
6. memetakan ketersediaan konten informasi pada website berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. melakukan diskusi terarah dengan pihak-pihak yang terkait

2. Pemodelan layanan informasi publik berbasis TI.

Berdasarkan pemetaan kondisi layanan publik berbasis TI pada website sampel, selanjutnya dilakukan pemodelan layanan informasi publik pada website pemerintah secara umum, yang meliputi : perumusan kanal-kanal (jalur layanan) portal informasi publik berdasarkan karakteristik daerah serta ketentuan perundangan yang berlaku, perumusan jenis layanan informasi publik, merancang model hubungan (link) antar website serta merancang keamanan sistem.

Model ini selanjutnya dimantapkan dengan metode diskusi terarah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian dengan pelayanan informasi publik. Hasil diskusi terarah akan dipergunakan untuk melakukan penyempurnaan layanan informasi publik berbasis TI sebagai output kegiatan tahap pertama.

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian Web Portal Informasi Publik Jawa Tengah Sebagai Model Layanan Informasi Publik Bagi Masyarakat dapat diilustrasikan pada diagram berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemetaan Kondisi Layanan Publik pada Website Pemerintah

5.1.1 Kajian Undang-Undang dan Peraturan tentang Penerapan E-Government

1. Pasal-pasal dari UU dan Peraturan tentang penerapan e-government di lingkungan pemerintah, yaitu :

a. UUD 45 pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

b. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Instruksi ditujukan kepada : Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota.

Kerangka Inpres Nomor 3 Tahun 2008 :

1. Motivasi Kebijakan e-Government

- a. Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis untuk mengembalikan kepentingan rakyat pada posisi sentral.
- b. Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Sehingga pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan berbagai pihak agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru.
- c. Apa yang dilaksanakan pemerintah tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan

informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.

- d. Adanya kecenderungan global menuju era masyarakat informasi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang *digital divide* karena tidak mampu memanfaatkan informasi.
- e. Dua modalitas tuntutan masyarakat :
 1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
 2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
- f. Kondisi pemerintah saat ini:
 1. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain.
 2. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarkiyang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini
- g. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

2. Tujuan Pengembangan e-Government

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

3. Kesiapan memanfaatkan TI

Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek berikut :

1. E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya)
3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas (akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi.
4. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

4. Inisiatif pengembangan eGov sebelum dikeluarkannya INPRES

Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :

1. pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah

2. belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi
3. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri sehingga kurang memperhatikan sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, interoperabilitas antar situs untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja ke dalam pelayanan publik yang terpadu.
4. Belum mampu mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

5. Strategi pengembangan e-Government

- a. Pencapaian tujuan egovernment perlu dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat, yaitu:
- b. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- c. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
- e. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- f. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- g. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan (informasi, interaksi, transaksi, integrasi) yang realistis dan terukur.

6. Langkah Pelaksanaan

- a. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.
- b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah pusat dan daerah

- c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara. (tinjau ulang aturan yang menghambat investasi)
- d. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government
- e. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis e-government dari masing-masing instansi pemerintah
- f. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

c. UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54 pasal

a. Kerangka

BAB I : Ketentuan UMUM

BAB II : Asas dan Tujuan

BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik

BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik

BAB V : Transaksi Elektronik

BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi

BAB VII : Perbuatan Yang Dilarang

BAB VIII : Penyelesaian Sengketa

BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

BAB X : Penyidikan

BAB XI : Ketentuan Pidana

BAB XII : Ketentuan Peralihan

BAB XIII : Ketentuan Penutup

b. Nama Domain, Haki & Perlindungan Hak Pribadi

1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
- c. Perbuatan Yang Dilarang Terdapat 10 pasal (27 s/d 37). Antara lain pasal 30 :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- d. Peran Pemerintah Dan Masyarakat
1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal

a. Dampak dan Makna

1. UU KIP memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap badan publik yang mendapat alokasi dana dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan dari himpunan dana masyarakat. Sanksi pidana menanti, jika badan publik tidak menjalankan amanat UU KIP
2. keberadaan UU KIP ini semakin menegaskan bahwa akses public terhadap suatu informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui juga oleh UUD 1945 Pasal 28 F. Hadirnya UU KIP akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik serta pengawasan atas pelaksanaan roda pemerintahan.
3. Dengan UU KIP upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan dapat dipercepat. Langkah itu merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

b. Kerangka

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II ASAS DAN TUJUAN
3. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
4. BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
5. BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
6. BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
7. BAB VII KOMISI INFORMASI

8. BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
9. BAB IX HUKUM ACARA KOMISI
10. BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
11. BAB XI KETENTUAN PIDANA
12. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
13. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
14. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

c. Klasifikasi Informasi

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (6 bulan)

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. laporan keuangan;
- d. dll, yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- a. Daftar seluruh IP yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan BP dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan BP;
- e. perjanjian BP dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- h. laporan mengenai pelayanan akses IP sebagaimana diatur dalam UU ini.

4. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Tahun

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;

- b. waktu yang diperlukan BP dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

5. Informasi yang Dikecualikan:

- a. IP yang dapat menghambat proses penegakan hukum,
- b. IP yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. IP yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
- d. IP yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. IP yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. IP yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. IP yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik;
- h. memorandum atau surat-surat antar BP atau intra BP, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi (KI) atau pengadilan;
- i. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap BP:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan juknis standar layanan IP yang berlaku secara nasional.

d. Ketentuan Pidana pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5.1.2 Analisis Penelitian Terdahulu

- a. Wiraatmaja, 2006, : “Desain dan Implementasi Sistem Portal e-Government di Indonesia”,

Penelitian :

- studi pendalaman untuk memahami konsep e-government dan portal pemerintahan
- melakukan kajian teoritis dengan melihat kondisi layanan pemerintahan dan membuat implementasi sistem

Kesimpulan :

- proses pengembangan portal e-Government merupakan satu kesatuan kerja berupa pengembangan konsep, sarana pendukung, pemahaman proses-proses pemerintahan yang ada, dan pengembangan arsitektur terpadu informasi dan layanan yang berlandaskan terciptanya tujuan akhir tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya terjaga,
- implementasi sistem yang dilakukan memperlihatkan bahwa model pengembangan dengan berbagai layanan dapat memberikan hasil ideal bila kerangka kerja yang diperlukan telah dipahami sehingga berbagai proses transformasi informasi dan layanan pemerintahan dapat dijalankan dengan baik.

- b. Hasibuan, 2007, : “Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda”

Penelitian:

analisis langkah – langkah strategis dan taktis pengembangan e-Government berdasarkan teori dan “best practices” dari beberapa instansi yang telah menerapkan e-Government,

Kesimpulan:

kendala utama dalam pengembangan e-Government dan metodologi pengembangan e-Government yang terbagi menjadi 3 bagian yang tidak tergantung antara satu dengan yang lainnya, yakni : Publish, Interact, Transact

- c. Chan, Lau, Pan, 2008. : “E-government implementation : A macro analysis of Singapore's e-government initiatives”

Penelitian : analisis interpretatif dari e-government yang berhubungan dengan berbagai inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Singapura.

Kesimpulan :

- Empat komponen utama implementasi e-Government adalah : (i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur e-government, (iv) e-government promosi. Keempat komponen tersebut kemudian secara konseptual terintegrasi ke dalam Kerangka Implementasi e-Government.
 - Kerangka kerja ini dapat digunakan sebagai alat deskriptif untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan berbagai inisiatif e-government, atau digunakan sebagai struktur preskriptif untuk merencanakan dan menyusun strategi implementasi e-government.
- d. Banciu, 2009, : “ e-Romania – A Citizens’ Gateway towards Public Information”
- Penelitian :** Melakukan kajian pengembangan portal informasi publik pada Pemerintah Romania
- Kesimpulan :**
- Konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line, serta
 - Diperlukan delapan tahap dalam pengembangan portal e-Romania, yakni : menentukan struktur portal ; identifikasi portal-portal resmi yang sudah ada ; menentukan struktur portal yang terhubung ; menetapkan kategori data untuk tingkat nasional ; menetapkan struktur konten informasi ; menetapkan cara mengakses informasi ; memperkirakan volume informasi serta sumber daya yang dibutuhkan ; memastikan keamanan sistem.
- e. Heng & Jincang , 2010. “An Integrated Approach to Developing a Succesfull One-Stop Portal e-Government”
- Penelitian :**
Melakukan kajian pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi,
- Kesimpulan :**
Empat tahap dalam pengembangan portal one-stop center yang terintegrasi, yakni : katalogisasi, transaksi, integrasi vertical, integrasi horizontal.

5.2 Analisis Observasi Website Pemerintah

5.2.1 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Tabel 1. Peta Situs Kabupaten Wonogiri

Menu Utama	Menu	Sub Menu
[A] Home	[1] Menu utama	[1] Profil
		[2] Potensi
		[3] Ekonomi dan bisnis
		[4] Fasilitas penunjang
		[5] Informasi umum
		[6] Download
	[2] Sub domain	[1] Dinas Kesehatan
		[2] BAPPEDA
		[3] Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		[4] Badan Kepegawaian Daerah
		[5] Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		[6] Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		[7] Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		[8] Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		[9] Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		[10] Kantor Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		[11] Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonogiri
		[12] Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Wonogiri
		[13] RSPD Wonogiri
		[14] DPPKAD Pemerintah Kabupaten Wonogiri
		[15] Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Wonogiri
		[16] Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Wonogiri
		[17] MDGS Wonogiri
		[18] LPSE e-Procurement
		[19] Keluarga Berencana
		[20] Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri
		[21] RSUD Wonogiri
		[22] KPPT
	[3] Link	[1] Visit Indonesia 2008
		[2] Bursa kerja online
		[3] Www.Indo.go.id
		[4] DPRD Wonogiri
		[5] Www.Jateng.go.id
		[6] SIM DIKLAT Kab.Wonogiri
		[7] Www.depdagri.go.id
		[8] Dinas Pendidikan Wonogiri

		[9] www.Central-Java.com
		[10] SIM KINERJA Kab.Wonogiri
	[4] Statistik	[1] Rekap pengunjung website
	[5] Pemerintah	[1] Bupati
		[2] Wakil Bupati
		[3] Sekretariat Daerah
		[4] Sekretariat DPRD
		[5] Inspektorat
		[6] Badan Daerah
		[7] Dinas Daerah
		[8] Kantor
		[9] Kecamatan
	[6] Fasilitas Daerah	[1] Geografis
		[2] Kesehatan
		[3] Pendidikan
		[4] Hukum
		[5] Keamanan
		[6] Bank
		[7] Telekomunikasi
		[8] PLN
		[9] PERUSDA
	[7] Pariwisata	[1] Waduk gajah mungkur
		[2] Pantai sembukan
		[3] Pantai nampu
		[4] Khayangan
		[5] Hutan kethu
		[6] Air terjun setren
		[7] Goa putri kencana
		[8] Hotel
	[8] Olahraga	[1] Gantole
		[2] Sepak bola
		[3] Bulutangkis
		[4] Sepeda
		[5] Lari 10 K
[B] Buku Tamu	[1] Form Buku Tamu	[1] Untuk mengisi data dan komentar pengunjung
[C] Webmail	-	-

5.2.2 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Tabel 2. Peta Situs Kabupaten Pekalongan

[B] Selayang pandang	[1] Profil	[1] Sambutan bupati
		[2] Sejarah
		[3] Visi dan Misi
		[4] Lambang dan Motto
		[5] Demografi

		[6] Sosial dan ekonomi budaya
	[2] Pemerintah	[1] Lembaga legislative
		[2] Lembaga eksekutif
		[3] Struktur organisasi
		[4] Profil kecamatan
	[3] Deskripsi Wilayah	[1] Kondisi geografis
		[2] Jarak jalan
		[3] Peta wilayah
		[4] Desa dan kelurahan
	[4] Sosial Budaya	[1] Pendidikan
		[2] Kesehatan
		[3] Agama
		[4] Kesejahteraan Sosial
		[5] Keluarga Berencana
	[5] Infrastruktur	[1] Perhubungan darat
		[2] Air minum
		[3] Pos dan telekomunikasi
		[4] Jalan raya
		[5] Listrik
[C] Ekonomi dan Bisnis	[1] Potensi investasi	[1] Sektor Industri
		[2] Potensi Sektor Industri Pengolahan
		[3] Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan
		[4] Potensi Sektor Kehutanan dan Perkebunan
		[5] Potensi Sektor Pariwisata dan Jasa
		[6] Potensi Sektor Perdagangan
		[7] Potensi Sektor Pertanian
		[8] Potensi Sektor Peternakan
	[2] Perusahaan produk unggulan	[1] Nama & Alamat Perusahaan Produk Unggulan Kab.Pekalongan
		[2] Daftar Nama & Alamat Perusahaan Industri Kab.Pekalongan
	[3] Komoditas	[1] Artikel tentang harga - harga komoditas Kab.Pekalongan
	[4] Keuangan dan Moneter	[1] Kurs Mata Uang Asing
		[2] Ekspor dan Impor
		[3] Inflasi
		[4] Indeks Harga
		[5] Realisasi Anggaran
	[5] Ketenagakerjaan	[1] Artikel Tentang Lapangan Pekerjaan & Pencari Kerja
	[6] Pajak dan retribusi	[1] Pajak dan Pembangunan
		[2] Retribusi
		[3] Pajak Daerah
	[7] Perbankan dan bisnis	[1] Cara menghitung tarif PDAM
		[2] Penyesuaian tarif PDAM Th.2013

		[3] Perusahaan
		[4] Tabungan POSINDO
		[5] Pasar
		[6] Pegadaian
		[7] Koperasi
		[8] Perbankan
[D] Pusat Data	[1] LPPD TH.2012	[1] Materi Tentang LPPD Th.2012
	[2] LPPD TH.2011	[1] Materi Tentang LPPD Th.2011
	[3] LAKIP 2008 - 2010	[1] Materi Tentang LAKIP 2008 – 2010
	[4] LKPJ	[1] Materi Tentang LKPJ Bupati
	[5] Data Strategis 2010	[1] LPPD Kab.Pekalongan Tahun 2011
		[2] LAKIP Tahun 2010
	[6] Data Strategis 2009	[1] RPJMD Kab.Pekalongan
		[2] Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) 2010
		[3] Indikator Kinerja Utama(IKU) 2009
		[4] DDA Kab.Pekalongan 2009
		[5] RKT 2010
		[6] Penetapan Kinerja 2010
		[7] LAKIP 2009
	[7] Data Strategis 2008	[1] DDA 2008
		[2] LAKIP 2008
	[8] Data Strategis 2007	[1] DDA 2007
[E] Perizinan	[1] Layanan perizinan terpadu	[1] Izin Usaha Pariwisata
		[2] Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air
		[3] Izin Lokasi
		[4] Izin Penyimpanan Sementara/Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun(B3)
		[5] Izin Pengobatan Tradisional
		[6] Izin Reklame
		[7] Surat Izin Pertambangan (IUP)
		[8] HO
		[9] TDP
		[10] SIUP
	[2] Layanan non perizinan	[1] Penetapan Lokasi
		[2] Sertifikat Laik Sehat(Jasa Boga/Catering,Restoran/Rumah Makan,Café)
		[3] Rekomendasi Penggunaan Alun -Alun Kajen
		[4] Persetujuan Prinsip
	[3] Materi perizinan	[1] Sosialisasi Perizinan Th.2012
[F] Pariwisata	[1] Tujuan wisata	[1] Brosur Wisata Kabalong
		[2] Brosur Kuliner Keluarga dan Kolam Renang
		[3] Brosur Wisata Outbound dan Bumi Perkemahan
		[4] Brosur Wisata Budaya & Keagamaan
		[5] Brosur Wisata Petungkriyono

		[6] Brosur Wisata Linggo Asri
		[7] Objek Wisata
	[2] Panduan wisata	[1] Wisata Kuliner Khas Pekalongan
		[2] Peta Lokasi Festival Durian Lolong 2013
		[3] Peta Wisata Petungkriyono
		[4] Peta Wisata Kab.Pekalongan
		[5] Panduan Wisata Kabupaten Pekalongan
	[3] Statistik kunjungan wisata	[1] Kunjungan Wisata 2011
[G] Peraturan	[1] UUD 1945	[1] Tentang Perubahan - Perubahan UUD 1945
	[2] UU RI	[1] Menginformasikan Undang - undang dan Peraturan RI
	[3] Peraturan Pemerintah	[1] Menginformasikan Peraturan Pemerintah
	[4] Peraturan Presiden	[1] Menginformasikan Peraturan Presiden (PERPRES)
	[5] Keputusan Presiden	[1] Menginformasikan Keputusan Presiden RI
	[6] Instruksi Presiden	[1] Menginformasikan Instruksi Presiden (Inpres)
	[7] Peraturan Daerah	[1] Menginformasikan Peraturan Daerah Kab.Pekalongan (PERDA)
	[8] Draft Perundangan	[1] Menginformasikan Tentang RUU, Raperda RPP 2010 – 2012
	[9] Peraturan Menteri	[1] Menginformasikan Semua Peraturan Dari Menteri RI
	[10] Peraturan Bupati	[1] Menginformasikan Peraturan Bupati dari Th. 2001 – 2013
	[11] Surat edaran	[1] Menginformasikan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	[12] Katalog produk hokum	[1] Menginformasikan Daftar PERDA Kab.Pekalongan dari Tahun ke Tahun
[H] Fasilitas Web	[1] Berita	[1] Berita Lokal
		[2] Berita Jawa Tengah
		[3] Berita Nasional
		[4] Blog Daerah
	[2] Artikel	[1] IPTEK
		[2] Ekonomi
		[3] Sosial Budaya
		[4] Pertanian
		[5] Pendidikan
		[6] Kesehatan
	[3] Informasi	[1] Info Lelang (Pengadaan Barang/Jasa)
		[2] Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Pekalongan
		[3] Info Beasiswa/Pendidikan
		[4] Info Penerimaan Pegawai
		[5] Info Lomba
		[6] Telepon Penting
		[7] Zona Free Hotspot
	[4] Interaktif	[1] Agenda Kegiatan
		[2] Galeri Foto
		[3] Galeri Video

		[4] Download
		[5] Buku Tamu
		[6] Kontak Kami
		[7] Pencarian

5.2.3 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tabel 3. Peta Situs Kabupaten Cilacap

Menu Utama	Menu	Sub Menu
[A] Sekilas Cilacap	[1] Halaman Utama	[1] Informasi terbaru seputar Kabupaten
	[2] Sejarah Cilacap	[1] Informasi sejarah Kab.Cilacap
	[3] Kondisi Umum	[1] Informasi kondisi geografis daerah
	[4] Visi-Misi	[1] Tentang visi & misi Pemkab Cilacap
	[5] Lambang, Motto & Sesanti	[1] Arti lambang & motto sesanti Kab.Cilacap
[B] Pimpinan Daerah	[1] Bupati	[1] Profil dari Bupati Cilacap
	[2] Wakil Bupati	[1] Profil dari Wakil Bupati Cilacap
[C] Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOTK 2011)	[1] Daftar semua SKPD	[1] Nama & alamat kantor Pimpinan SKPD
	[2] Sekretariat Daerah	[1] Nama & alamat kantor Sekretariat Daerah
	[3] Staf Ahli Bupati	[1] Nama & alamat staf ahli Bupati
	[4] Dinas	[1] Nama Dinas & alamat kantor Dinas
	[5] Badan	[1] Nama Badan & alamat kantor Badan
	[6] Lembaga	[1] Nama Lembaga Lain & alamat kantornya
	[7] Kecamatan	[1] Nama Kecamatan & alamat kantornya
[D] Kontak Web	[1] Kontak Admin	[1] Form untuk mengirim pesan kepada admin
	[2] Daftar e-mail SKPD	[1] Daftar alamat email SKPD Kab.Cilacap
	[3] Webmail alternatif	[1] Form Login
	[4] Panduan e-mail SKPD	[1] Panduan koneksi webmail Cilacap
[E] Cilacap Pro Investasi	[1] Kontak Bisnis	[1] Daftar kontak bisnis & alamat kantor
	[2] Swasta	[1] Daftar kontak perusahaan swasta & alamat kantor
[F] Produk Hukum	[1] Peraturan Daerah	[1] Link hukum.cilacapkab.go.id
	[2] Peraturan Bupati	[1] Link hukum.cilacapkab.go.id
[G] Informasi Publik	[1] Trayek Angkutan Kota	[1] Perubahan Jalur Angkutan Trayek A2 dan Ba
	[2] Pajak kendaraan STNK	[1] Link dppad.jatengprov.go.id
	[3] Nilai jual kendaraan	[1] Link dppad.jatengprov.go.id
	[4] Tagihan listrik	-
	[5] Jadwal Kereta Api	-
	[6] Tagihan Telephone	[1] Link infobill.telkom.co.id

	[7] Jadwal Penerbangan Susi Air	[1] Link www.susiair.com
	[8] Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	[1] Ringkasan & Laporan Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah
	[9] Sekolah	-
	[10] Kesehatan	-
	[11] Ekonomi	-
	[12] Kependudukan	-
	[13] Pariwisata & Kuliner	-
	[14] Transportasi	-
	[15] Keamanan	-
	[16] Industri	-
[H] Rubrik	[1] Berita Kabupaten	[1] Berita Kabupaten Cilacap
	[2] Pengumuman	-
	[3] Lain – lain	-
	[4] Artikel	-
	[5] Sosial	-
[I] Login	[1] Form login	-
[J] Statistik Situs	[1] Daftar Pengunjung Website	-
[K] Info Gempa	[1] Update berita gempa di Indonesia	-
[L] Pengumuman	[1] LPSE PEMKAB Cilacap	[1] Link lpse.cilacapkab.go.id
[M] Wisata & Budaya Cilacap	[1] Daftar wisata & budaya di Kab.Cilacap	[1] 7 tempat wisata & budaya di Cilacap
[N] Standar Harga 2013	[1] Perbup 122 th 2013	[1] File Perbup 122 th 2013
	[2] SSH Rekening Belanja	[1] File SSH Rekening Belanja
	[3] SSH Bahan Bangunan	[1] File SSH Bahan Bangunan
	[4] SSH Bahan Bangunan 2	[1] File SSH Bahan Bangunan 2
	[5] SSH Lampiran I (1-50)	[1] File SSH Lampiran I (1-50)
	[6] SSH Lampiran I (51-100)	[1] File SSH Lampiran I (51-100)
	[7] SSH Lampiran I (101-150)	[1] File SSH Lampiran I (101-150)
	[8] SSH Lampiran I (151-194)	[1] File SSH Lampiran I (151-194)
[O] Info Layanan Publik	[1] Akte Kelahiran	[1] Tata cara administrasi akte kelahiran
	[2] KTP/KK	[1] Tata cara administrasi KTP & KK
[P] Info Telepon Penting	[1] Daftar nomor telepon penting	[1] 12 Daftar telepon penting
[Q] Link Dinas / Instansi	[1] GIS PEMETAAN PEGAWAI	[1] bkd.cilacapkab.go.id
	[2] DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN	[1] hutbun.amer.web.id

	[3] BINA MARGA SDA ESDM	[1] binamarga.cilacapkab.go.id
	[4] DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	[1] pariwisata.cilacapkab.go.id
	[5] DKP2SKSA	[1] dkp.cilacapkab.go.id
	[6] BPBD CILACAP	[1] bpbd.cilacapkab.go.id
	[7] KPUD CILACAP	[1] kpud-cilacapkab.go.id
	[8] PENGADILAN AGAMA	-
	[9] JARDIKNAS Kabupaten Cilacap	[1] jardiknascilacap.blogspot.com
[R] Info Cilacap lainnya	[1] BPS CILACAP	-
	[2] PSCS	-
	[3] TP PKK CILACAP	-
	[4] KELUARGA BESAR SAKA BHAYANGKARA	[1] www.wirasabha.web.id

5.2.4 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Kudus

Tabel 4. Peta Situs Kabupaten Kudus

Menu Utama	Menu	Sub Menu
[A] Home	[1] Informasi Seputar Kudus	[1] Merupakan Tampilan Utama
	[2] Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	[1] Link daftar pengeluaran anggaran daerah
	[3] LPSE Kabupaten Kudus	[1] lpse.kuduskab.go.id
	[4] Radio Suara Kudus	[1] www.radiosuarakudus.com
	[5] Link Berita Kudus	[1] Link 14 Berita Seputar Kudus
	[6] Link Instansi Daerah	[1] Link 14 Instansi Daerah
	[7] Link Pendidikan	[1] Link 15 tempat Pendidikan
	[8] Link Instansi Pusat	[1] Link 6 Instansi Pusat
[B] TENTANG KUDUS	[1] Tentang Kudus	[1] Sejarah Kota Kudus
		[2] Arti Lambang
		[3] Kudus Kota Wali
		[4] Tentang Menara Kudus
		[5] Kudus Kota Kretek
		[6] Kekhasan Rumah Adat Kudus
		[7] Pakaian Adat Kudus
		[8] Acara Adat Kota Kudus
		[9] Pengantin Tradisional Kudus
		[10] Tarian Tradisional Kudus
		[11] Eksotika Batik Kudus
		[12] Letak Geografis Kota Kudus
		[13] Wilayah Administratif
		[14] Sejarah Museum Kretek

	[2] Informasi Kesenian di Kudus	[1] Organisasi Seni Tradisional
		[2] Statistik Organisasi Seni
	[3] Lokasi Fasilitas Umum	[1] ATM dan Bank
		[2] Rumah Sakit
		[3] Apotek dan Toko Obat
		[4] Optik
		[5] Laboratorium
		[6] Tempat Olahraga
		[7] Gerai Operator Seluler
		[8] Klinik Kecantikan
	[4] Galeri Wisata	[1] Foto Tempat Wisata
	[5] Angka Kunjungan Wisata	[1] Tabel Daftar Kunjungan
	[6] Kunjungan Wisata Kudus	[1] Peta Wisata
		[2] Wisata Alam
		[3] Wisata Sejarah
		[4] Wisata Rekreasi
		[5] Wisata Budaya Berbasis Masyarakat
		[6] Kolam Pancing di Kudus
		[7] Kuliner Khas Kudus
		[8] Oleh - oleh Khas Kudus
		[9] Tempat Makan
		[10] Lokasi Belanja
		[11] Biro Perjalanan
		[12] Rute angkota
		[13] Rute Angkutan Wisata
	[7] Informasi Wisata	[1] Calendar of Event
		[2] Informasi Hotel
		[3] Gedung Pertemuan
[C] PEMERINTAH	[1] PROFIL PEMKAB KUDUS	[1] Visi dan Misi
	[2] Organisasi Pemerintah	[1] Materi Peraturan Daerah Kab.Kudus
	[3] Kecamatan dan Kelurahan	[1] Daftar kecamatan dan kelurahan di Kab.Kudus
	[4] Kuantitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	[1] Data Pegawai Negeri Sipil
	[5] Dokumen RPJMD	[1] Dok.Perencanaan pembangunan daerah 5 tahunan
	[6] Profil Instansi Daerah	[1] Bupati
		[2] Wakil Bupati
		[3] Asisten Pemerintah
		[4] Asisten Ekbang Kesra
		[5] Asisten Administrasi
		[6] Bagian Tata Pemerintahan
		[7] Bagian Pemerintahan Desa
		[8] Bagian Hukum
		[9] Bagian Humas
		[10] Bagian Perekonomian

		[11] Bagian Kesejahteraan Rakyat
		[12] Bagian Pengendalian Pembangunan
		[13] Bagian Pengelolaan Aset Daerah
		[14] Bagian Organisasi dan Kepegawaian
		[15] Bagian Umum
		[16] Sekretariat DPRD
		[17] Badan Kepegawaian Daerah
		[18] BAPPEDA
		[19] Bapermas, Perempuan dan KB
		[20] Inspektorat Kabupaten
		[21] Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		[22] Dinas Kesehatan
		[23] Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		[24] Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
		[25] Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
		[26] Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
		[27] Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM
		[28] Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		[29] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		[30] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		[31] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		[32] Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
		[33] Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		[34] Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
		[35] Kantor Lingkungan Hidup
		[36] Kantor Ketahanan Pangan
		[37] Kantor Kebaglinmas
		[38] Satuan Polisi Pamong Praja
		[39] Rumah Sakit Umum Daerah
	[7] Lembaga Legislatif dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	[1] Susunan keanggotaan DPRD Kab. Kudus dan Perda
	[8] Peraturan Kepegawaian	[1] Aspek - aspek kepegawaian / PNS
[D] PELAYANAN PUBLIK	[1] PELAYANAN SATU ATAP	[1] Daftar jenis perijinan pelayanan satu atap
	[2] Jenis Pelayanan Publik	[1] Pelayanan Kependudukan
		[2] Bimbingan dan Penyuluhan Industri
		[3] Pelayanan Bantuan Informasi Industri
		[4] Pelayanan Bantuan Dana Bergulir
		[5] Pelayanan Bantuan Mesin/Peralatan Bagi IKM (Pinjam Pakai)
		[6] Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro
		[7] Pengurusan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SP-IRT)

		[8] Membantu Pengurusan Usulan HAKI
		[9] Pemberian Ijin/Badan Hukum Pendirian Koperasi
		[10] Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
		[11] Pelayanan Pembubaran Koperasi
		[12] Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang
		[13] Pelayanan Dana Bergulir Koperasi
		[14] Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
		[15] Pengajuan Izin Pembuangan Limbah Cair
		[16] Perizinan Perimbasan/Penebangan Pohon Penghijauan
		[17] Prosedur Permohonan Sewa Gedung Wanita Ngasirah
		[18] Pajak Hiburan
		[19] Pajak Reklame
		[20] Pajak Parkir
		[21] Pelayanan Bidang Pertanian
		[22] Pelayanan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		[23] Pelayanan Pariwisata
		[24] Permohonan dan Perpanjangan IUJK
		[25] Ijin penurunan trotoar, ijin galian kabel dan ijin pavingisasi bahu jalan
[E] INVESTASI	[1] Pembangunan Trade Center Kudus	
	[2] Pengembangan Obyek Wisata Colo	
	[3] Pembangunan Industri Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik di Lokasi TPA Tanjungrejo Kec.Jekulo Kab.Kudus	
	[4] Kudus dengan Sejuta Pesona	[1] Foto Semarak Kab.Kudus
[F] GALERI	[1] Foto Perjalanan Kudus	
[G] Buku Tamu	[1] Form Buku Tamu	[1] Nama
		[2] Email
		[3] Waktu
		[4] Pesan
		[5] Kirim Reset
[H] EKONOMI	[1] Kondisi Perekonomian Kab. Kudus	[1] Administrasi HAK MERK (HKI)
		[2] Cukai Rokok
		[3] Ekspor Non Migas Kab Kudus
		[4] Eksportir
		[5] Indeks Harga Konsumen
		[6] Industri dan Perkembangannya
		[7] Industri Kecil
		[8] Industri Skala Besar dan Menengah

		[9] Koperasi
		[10] Koperasi (Pembukaan Kantor)
		[11] Koperasi (Pendirian dan Pembubaran)
		[12] Koperasi (Perubahan Anggaran Dasar)
		[13] Koperasi (Pinjaman Bergulir)
		[14] Pasar di Kabupaten Kudus
		[15] Penataan Pedagang Kaki Lima
		[16] Perbankan
		[17] Perkembangan Raskin
		[18] Resi Gudang
		[19] Sektor Perdagangan
		[20] UMKM
	[2] Kekayaan Industri Kabupaten Kudus	[1] Data Industri yg ada di Kab Kudus
	[3] Data Statistik PDRB Kab. Kudus	[1] Data PDRB BPS Kab Kudus
	[4] Daftar Harga Pasar	[1] List Daftar Harga Pasar
	[5] Perusahaan Daerah	[1] Profil PD Bank Pasar
		[2] Profil PD BPR BKK
		[3] Profil PD Apotek
		[4] Profil PD Percetakan
		[5] Profil PDAM
[I] INFRASTRUKTUR	[1] Infrastruktur Kabupaten Kudus	[1] Transportasi
		[2] Irigasi dan Sumber Daya Air
		[3] Perumahan dan Pemukiman
		[4] Drainase
		[5] Energi dan Telekomunikasi
	[2] Dokumen Sanitasi	[1] Buku Putih Sanitasi
		[2] Strategi Sanitasi Kabupaten Kudus
	[3] Kampanye Sanitasi	[1] Poster elektronik
	[4] Kondisi Existing Infrastruktur Kabupaten Kudus	[1] Kondisi Geografis Kab Kudus
		[2] Jalan dan Jembatan
		[3] Sarana Perhubungan
		[4] Irigasi
		[5] Drainase
		[6] Air Bersih
		[7] Air Limbah Rumah Tangga
		[8] Persampahan
		[9] Jaringan Listrik
		[10] Telekomunikasi
		[11] Galian C di Kabupaten Kudus
		[12] Lingkungan Hidup
	[5] Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	-
[J] KESEHATAN	[1] Kondisi Bidang Kesehatan	[1] Kronologi Kondisi Kab Kudus dalam

	Kab Kudus	Bidang Kesehatan
	[2] Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat	[1] Daftar Pusat Kesehatan di Kab Kudus
	[3] Banyaknya Dokter menurut keahlian	[1] Daftar Dokter Keahlian di Kab Kudus
	[4] PHBS Cuci Tangan Pakai Sabun	[1] Sosialisasi PHBS
	[5] Pencapaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus	[1] Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
		[2] Angka Kematian Bayi
		[3] Angka Kematian Balita
		[4] Angka Kematian Ibu Maternal
		[5] Morbiditas
		[6] Status Gizi
		[7] Rumah dan Tempat Umum Sehat
		[8] Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		[9] Posyandu
		[10] Sarana Kesehatan
		[11] Desa UCI
		[12] Kejadian Luar Biasa (KLB)
		[13] Pelayanan Jaminan Kesehatan
[K] PENDIDIKAN	[1] Kondisi Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus	[1] Kronologi Kondisi Kab Kudus dalam Bidang Pendidikan
	[2] Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Kab Kudus	[1] Daftar total jumlah sekolah, murid dan guru yg ada di kab Kudus
	[3] PPDB ONLINE	-
	[4] Profil Bidang Pendidikan Kab Kudus	[1] Data Lembaga PAUD
		[2] Data Taman Kanak – Kanak
		[3] Data Sekolah Dasar
		[4] Data Sekolah Menengah Pertama
		[5] Sekolah Menengah Atas
		[6] Sekolah Menengah Kejuruan
		[7] Madrasah Ibtidaiyah
		[8] Madrasah Tsanawiyah
		[9] Madrasah Aliyah
	[5] Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional	[1] SMP Negeri 1 Kudus
		[2] SMA Negeri 1 Kudus
	[6] Link Pendidikan	[1] Buku Sekolah Elektronik (BSE)
		[2] Kementerian Pendidikan Nasional
		[3] Kemendiknas Beasiswa Unggulan
[L] SOSIAL	[1] Kependudukan	[1] Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk
		[2] Mata Pencaharian Penduduk
	[2] Sosial	[1] Kronologi Sosial penduduk Kab Kudus
	[3] Tenaga Kerja	[1] Kronologi Tenaga Kerja penduduk Kab Kudus
	[4] Transmigrasi	[1] Kronologi Transmigrasi penduduk Kab Kudus

	[5] Kondisi Sosial Kab Kudus	[1] Daftar Partai Politik di Kab Kudus
		[2] Data Ormas / LSM Aktif
		[3] Indikator Keluarga Sejahtera
		[4] Keluarga Berencana
		[5] Ketenagakerjaan
		[6] Panti Asuhan
		[7] Penduduk Kab Kudus
		[8] Transmigrasi
	[6] Menuju Kabupaten Layak Anak	[1] Visi Anak Kudus SMART
		[2] Tahapan dan pendekatan pengembangan Kudus Kab Layak Anak
		[3] Ukuran keberhasilan kebijakan Kudus Kab Layak Anak
	[7] Jadwal dan Syarat Pelatihan UPT BLK Dinsosnakertrans	[1] web.blkkabkudus.com
	[8] Informasi Lowongan Kerja	-
[M] PERTANIAN	[1] Kondisi Pertanian Kab Kudus	[1] Kronologi Kondisi Pertanian Kab Kudus
	[2] Profil Pertanian Kab Kudus	[1] Pertanian Tanaman Pangan
		[2] Perkebunan dan Kehutanan
		[3] Peternakan
		[4] Perikanan
		[5] Pengendalian Hama
		[6] Diversifikasi Pangan
		[7] Database Ketahanan Pangan
		[8] Pengelolaan Pasca Panen
		[9] Peta Rawan Pangan
		[10] Biogas
		[11] Sarang Walet
		[12] Jeruk Besar Pamelu
		[13] Distribusi Pangan
[N] STATISTIK	[1] Data - Data Kabupaten Kudus	[1] File Download

5.2.5 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Semarang

Tabel 5. Peta Situs Kabupaten Semarang

Menu Utama	Menu	Sub Menu
[A] BERANDA	[1] Berita dan Artikel	[1] Berita dan Artikel seputar Kab.Semarang
	[2] Pengumuman	[1] ILPPD Tahun 2011
		[2] Hasil Survey IKM 2012
		[3] Pengantar Std Pelayanan
		[4] SP Sekretariat
		[5] SP Dinas
		[6] SP Lembaga Teknis

		[7] SP Kec. dan Kel.
		[8] SP Satpol
		[9] Pengumuman Tenaga Honorer K2 2013
	[3] Sekretariat Daerah Kab.Semarang	[1] Alamat Sekretariat Daerah
	[4] Link Instansi	[1] www.jatengprov.go.id
		[2] www.bursakerja-jateng.com
		[3] Dinas Pendidikan Kab.Semarang
		[4] BPS Kabupaten Semarang
		[5] Semarangkab.go.id
		[6] blhsmgkab.blogspot.com
		[7] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Semarang
		[8] Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Semarang
		[9] RSUD Ambarawa
	[5] Pengunjung	[1] Daftar pengunjung website
[B] VISI MISI	[1] Visi	[1] Visi Kab.Semarang
	[2] Misi	[1] Misi Kab.Semarang
[C] SELAYANG PANDANG	[1] Sejarah	[1] Sejarah Kab.Semarang
	[2] Lambang Daerah	[1] Arti Lambang Kab.Semarang
	[3] Kondisi Umum	[1] Geografi dan Topografi
		[2] Infrastruktur
	[4] Bupati Semarang	[1] CV Bupati Kab.Semarang
	[5] Wakil Bupati Semarang	[1] CV Wabup Kab.Semarang
[D] INFORMASI PUBLIK	[13] Produk Hukum	[1] Peraturan Daerah
		[2] Peraturan Bupati
[E] SURAT WARGA	[14] Pesan	[1] Aspirasi Warga Kab.Semarang
[F] LOGIN	[15] Form Login	[1] Nama
		[2] Nama Pengguna
		[3] Surel
		[4] Kata Kunci
		[5] Verifikasi Sandi Lewat
		[6] Spam Check
		[7] Daftar

5.2.6 Hasil Observasi Website Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tabel 6. Peta Situs Kabupaten Kebumen

Menu Utama	Menu	Sub Menu
[A] HOME	[1] Berita Kebumen	[1] Berita seputar Kebumen
	[2] Berita dalam foto	[2] Berita dengan penyampaian foto
	[3] Informasi	[3] Informasi tentang Kab.Kebumen
	[4] Agenda Bupati	[4] Jadwal kegiatan Bupati

	[5] Lowongan	[5] Daftar lowongan pekerjaan
	[6] Institusi	[6] Daftar Institusi dan Organisasi di Kab.Kebumen
	[7] Polling	[7] Penilaian website Kab.Kebumen oleh pengunjung website
	[8] Potensi Daerah	[8] Tempat wisata yang ada di Kab.Kebumen
	[9] Interaksi	[9] Interaksi antara pengunjung dan admin website
	[10] Statistik Pengunjung	[10] Data pengunjung situs website Kab.Kebumen
	[11] Artikel	[11] Artikel informasi umum
	[12] Kurs Mata Uang	[12] Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
	[13] Jadwal Sholat	[13] Waktu sholat untuk umat Islam
	[14] Diseminasi	[14] Informasi tentang peluang usaha
	[15] Tautan Luar	[15] Link dengan Institusi Pemerintah
	[16] Telephone	[16] Telephone penting untuk Kab.Kebumen
	[17] Galeri	[17] Dokumentasi Kegiatan
[B] PROFIL	[1] Peta	[1]Penjelasan Peta Kab.Kebumen
	[2] Sejarah	[1] Penjelasan Sejarah Kab.Kebumen
	[3] Visi dan Misi	[1] Penjelasan Visi & Misi Kab.Kebumen
	[4] Geografis	[1] Penjelasan Letak Geografis Kab.Kebumen
	[5] Lambang Daerah	[1] Penjelasan Arti Lambang Daerah Kab.Kebumen
[C] PEMERINTAH	[1] Profil Bupati	[1] CV Bupati Kab.Kebumen
	[2] Profil Wakil Bupati	[1] CV Wakil Bupati Kab.Kebumen
	[3] Instansi	[1] Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
		[2] Dinas Daerah
		[3] Lembaga Teknis Daerah
		[4] Kecamatan dan Kelurahan
	[4] Transparansi Anggaran	[1] Ringkasan RKA SKPD
		[2] Ringkasan RKA PPKD
		[3] Ranperda Tentang APBD dan Perubahan APBD
		[4] Perda Tentang APBD dan Perubahan APBD
		[5] Ringkasan DPA SKPD
		[6] Ringkasan DPA PPKD
		[7] Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
		[8] Laporan Realisasi Anggaran PPKD
		[9] LKPD yang telah diaudit
		[10] Opini atas LKPD
	[5] Muspida	[1] Daftar Pejabat Muspida
	[6] Eksekutif	[1] Daftar Pejabat Eksekutif
	[7] Legislatif	[1] Daftar Pejabat Legislatif
	[8] Kumpulan Perda	[1] Kumpulan Perda dari Tahun 1985 – 2012
	[9] Dokumen Daerah	[1] Kumpulan Arsip - arsip Daerah (File)
	[10] Organisasi Sosial	[1] NU
		[2] Muhammadiyah

		[3] Hidayatulloh
		[4] Organda
		[5] IDI
[D] FASILITAS	[1] Kesehatan	[1] Rumah Sakit
		[2] Apotek
		[3] Puskesmas
		[4] Klinik
		[5] Laboratorium
	[2] Pendidikan	[1] Tentang pendidikan di Kab.Kebumen & daftar sekolah
	[3] Ekonomi	[1] Pasar Tradisional
		[2] Swalayan
		[3] Perusda
		[4] ATM
	[4] Transportasi	[1] Kereta Api
		[2] ANGKUDES
		[3] DAMRI
		[4] Bus AKDP
[E] LAYANAN	[1] Kependudukan	[1] KK
		[2] KTP
		[3] Surat Pindah
		[4] Akta Kelahiran
		[5] Akta Kematian
		[6] Akta Perkawinan Non Islam
		[7] Pencatatan Pengakuan Anak
		[8] Pencatatan Pengesahan Anak
		[9] Akta Perceraian
		[10] Tarif Retribusi
	[2] Perizinan	[1] Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
		[2] Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		[3] Izin Trayek
		[4] Izin Penyelenggaraan Reklame
		[5] Izin Usaha Bidang Pariwisata
	[3] Kesehatan	[1] Layanan Perijinan Nakes
		[2] Layanan Penyuluhan Keamanan Pangan
		[3] Layanan Jamkesda
		[4] Sertifikat Laik Sehat DAMIU
	[4] Perbankan	[1] Bank Jateng
		[2] Bank Mandiri
		[3] Bank BCA
		[4] Bank Danamon
		[5] Bank Muamalat
		[6] Bank CIMB NIAGA
		[7] Bank BRI
		[8] Bank BNI

		[9] Bank BTPN
[F] PARIWISATA	[1] Kesenian	[1] Info tentang kesenian di Kab.Kebumen
	[2] Restoran	[1] Daftar rumah makan dan restoran
	[3] Hotel	[1] Daftar Hotel Di Kab.Kebumen
	[4] Biro Perjalanan	[1] Data Nama Biro Perjalanan & Wisata Kab.Kebumen
	[5] Event Wisata	[1] Daftar Wisata Kebudayaan Khas Kab.Kebumen
	[6] Produk Unggulan	[1] Potensi - potensi bisnis UKM di Kab.Kebumen
	[7] Homestay	[1] Data Homestay di Kab.Kebumen
	[8] Desa Wisata	[1] Data Desa Wisata yg ada di Kab.Kebumen
	[9] Makanan Khas	[1] Daftar Makanan Khas Kab.Kebumen
[G] WEBMAIL	[1] Form pengunjung	[1] Login pengunjung
[H] HUBUNGI KAMI	[1] Alamat dan no.tlp	[1] Alamat dan no.tlp yang bisa di akses

Dari hasil analisis observasi website ke-6 (enam) website pemerintah diatas diperoleh jumlah menu yang terdapat pada masing-masing website pemerintah sebagai berikut :

Tabel 7. Menu Website Pemerintah

No	Peta Situs	Jumlah Menu
1	Website Kabupaten Wonogiri mewakili Karesidenan Surakarta	71
2	Website Kabupaten Cilacap mewakili Karesidenan Banyumas	133
3	Website Kabupaten Pekalongan mewakili Karesidenan Pekalongan	73
4	Website Kabupaten Kudus mewakili Karesidenan Pati	249
5	Website Kabupaten Semarang mewakili Karesidenan Semarang	33
6	Website Kabupaten Kebumen mewakili Karesidenan Kedu	101

5.3 Hasil Analisis Layanan Website Berdasarkan Tingkatan E-Government

Hasil analisis observasi layanan website pemerintah kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pekalongan, Kudus, Semarang dan Kebumen berdasarkan tingkatan e-government adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Jenis Layanan Website Berdasarkan Tingkatan E-Government

No	Website Pemerintah Kabupaten	Jenis layanan e-government				
		1	2	3	4	5
1	Website Kabupaten Wonogiri	71	-	-	-	-
2	Website Kabupaten Cilacap	133	-	-	-	-

3	Website Kabupaten Pekalongan	73	-	-	-	-
4	Website Kabupaten Kudus	249	-	-	-	-
5	Website Kabupaten Semarang	33	-	-	-	-
6	Website Kabupaten Kebumen	101	-	-	-	-

Keterangan :

Jenis layanan 1 : informatif

Jenis layanan 2 : interaktif

Jenis layanan 3 : interaktif kolaboratif

Jenis layanan 4 : one-stop services

Jenis layanan 5 : information push

Dalam tabel 8, dapat disimpulkan bahwa semua website berada pada tingkatan yang paling awal dalam *E-Government*, yakni untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, *E-Government* tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *E-Government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *Good Governance*.

5.4 Hasil Analisis Kualitas Konten Informasi

Hasil analisis observasi layanan website pemerintah kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pekalongan, Kudus, Semarang dan Kebumen berdasarkan kualitas konten informasi tersaji dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9. Layanan Website Berdasarkan Kualitas Konten Informasi

No	Website Pemerintah	Kualitas Informasi		
		Akurasi	Kekinian	Relevansi
1	Website Kabupaten Wonogiri	97%	94%	97%
2	Website Kabupaten Cilacap	100%	77%	100%
3	Website Kabupaten Pekalongan	74%	74%	74%

4	Website Kabupaten Kudus	98%	98%	100%
5	Website Kabupaten Semarang	91%	91%	91%
6	Website Kabupaten Kebumen	89%	89%	89%

Dalam tabel 9 terlihat bahwa layanan situs masih bersifat informatif dan didukung dengan konten informasi yang berkualitas (akurat, terkini dan relevan)

5.5 Hasil Analisis Ketersediaan Konten Informasi Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008

Hasil analisis ketersediaan konten-konten informasi pada website pemerintah kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pekalongan, Kudus, Semarang dan Kebumen berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Layanan Website Berdasarkan Ketersediaan Konten Informasi sesuai UU 14/2008

No	Pasal	Ayat	Huruf	Website Pemerintah Kabupaten					
				Wonogiri	Cilacap	Pekalongan	Kudus	Semarang	Kebumen
1	9	2	A	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2			B	tidak ada	tidak lengkap	tidak ada	tidak lengkap	tidak ada	tidak ada
3			C	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	10	1		ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	11	1	A	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6			B	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
7			C	ada	ada	ada	ada	ada	ada
8			D	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9			E	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
10			F	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11			G	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
12			H	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
13	12		A	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
14			B	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
15			C	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
16			D	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan :

1. Semua situs menyediakan informasi yang berkaitan dengan Badan Publik.

2. Sebagian situs tidak menyediakan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait meskipun tidak lengkap.
3. Hampir semua situs menyediakan informasi mengenai laporan keuangan.
4. Semua situs menyediakan fasilitas pengumuman informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
5. Semua situs tidak memberikan informasi tentang daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Semua situs tidak memberikan informasi tentang hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
7. Semua situs memberikan informasi tentang seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
8. Semua situs memberikan informasi tentang rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
9. Semua situs tidak memberikan informasi tentang perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
10. Semua situs memberikan informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
11. Hampir semua situs memberikan informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
12. Semua situs tidak memberikan laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
13. Semua situs tidak menyediakan memberikan informasi tentang jumlah permintaan informasi publik yang diterima.
14. Semua situs tidak menyediakan memberikan informasi waktu yang diperlukan oleh badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik
15. Semua situs tidak memberikan informasi tentang jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi publik.
16. Semua situs tidak memberikan informasi alasan penolakan permintaan informasi publik (bila ada).

Berdasarkan tabel 10 terlihat bahwa pada 6 (enam) website Pemerintah hanya 43 % saja yang konten informasinya berdasarkan pasal - pasal dan ayat –ayat pada UU No. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5.6 Perancangan Web Portal

Portal web (website portal) adalah sebuah situs web yang menyediakan beragam informasi dari berbagai sumber dengan cara (format/layout) yang seragam. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi beberapa portal dengan "kandungan lokal - jangkauan global" bermunculan di negara-negara seperti India (Rediff) dan RRC (Sina). Portal-portal semacam ini mampu menjangkau komunitasnya yang tersebar di seluruh dunia. Khusus untuk web portal informasi publik, landasan umum dalam perancangan web portal adalah :

1. Pasal 2 ayat (3)

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

“tepat waktu” maksudnya adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

“cara sederhana” maksudnya adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

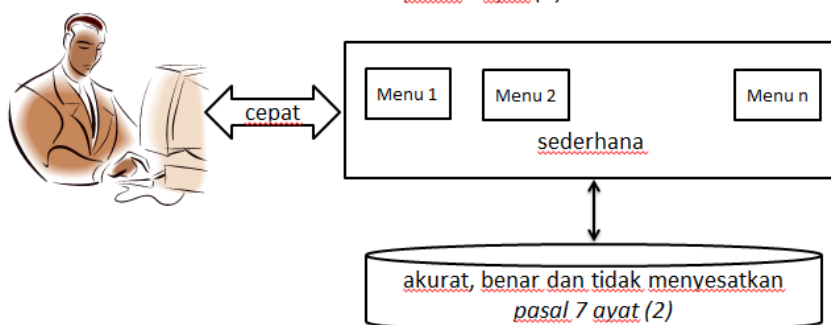
2. Pasal 7 ayat (2) dan (3)

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Secara umum dapat akses web portal informasi publik adalah sebagai berikut :

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
pasal 2 ayat (3)



Gambar 2. Akses Web Portal Informasi Publik

5.6.1 Perancangan Kanal Portal Informasi Publik

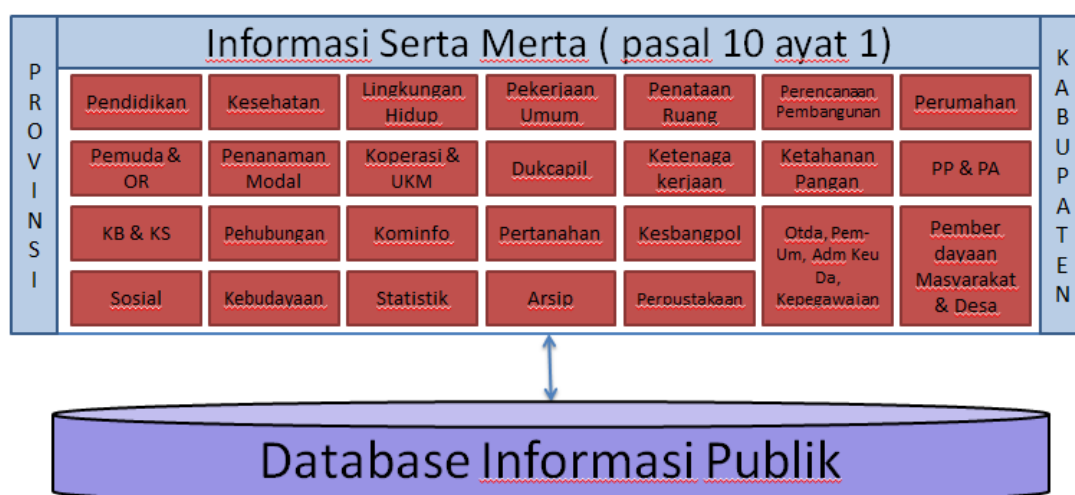
Kanal-kanal informasi publik harus dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami, sehingga kanal-kanal informasi publik yang dirancang harus bersifat permanen atau tidak berubah-ubah. Rumusan kanal informasi publik yang bersifat permanen mengacu pada pasal 2 ayat 1 PP nomor 38 tahun 2007, bahwa Urusan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;
5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;

13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanahan;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;
23. kebudayaan;
24. statistik;
25. kearsipan; dan
26. perpustakaan.

Dengan mengacu pada ketentuan diatas maka kanal-kanal informasi publik disusun sebagai berikut :

RANCANGAN KANAL-KANAL INFORMASI PUBLIK



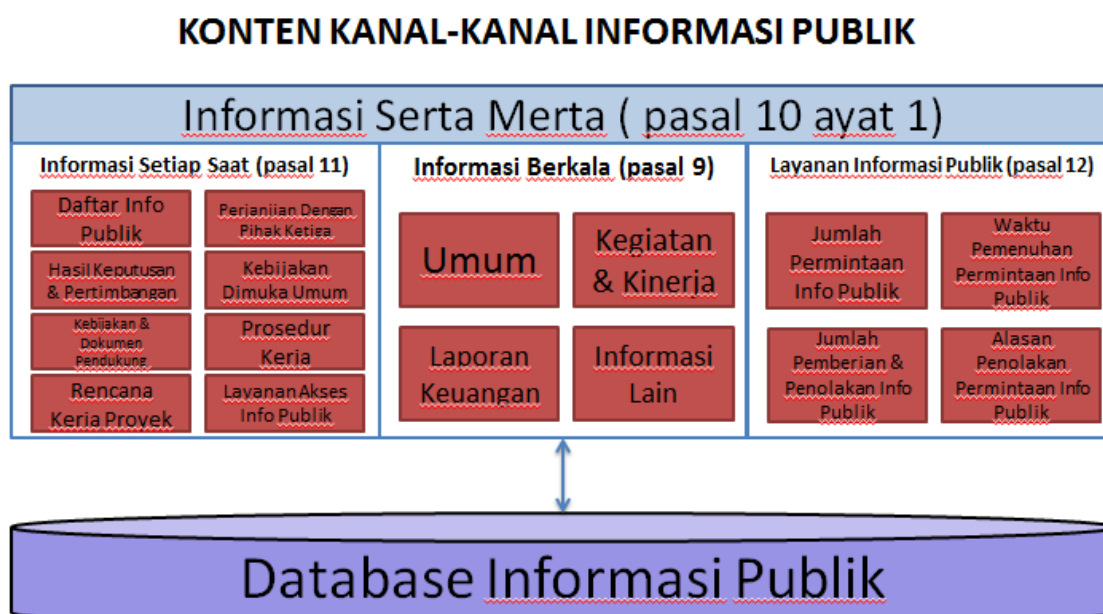
Gambar 3. Rancangan Kanal-Kanal Informasi Publik

5.6.2 Perancangan Konten Kanal Portal Informasi Publik

Konten tiap kanal informasi publik disusun berdasarkan ketentuan UU No. 14 tahun 2008, bahwa informasi publik terdiri dari :

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala.
2. informasi yang wajib disampaikan secara serta merta.
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dengan demikian, rancangan konten informasi publik adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Rancangan Konten Informasi Publik

5.6.3 Perancangan Layanan Portal Informasi Publik

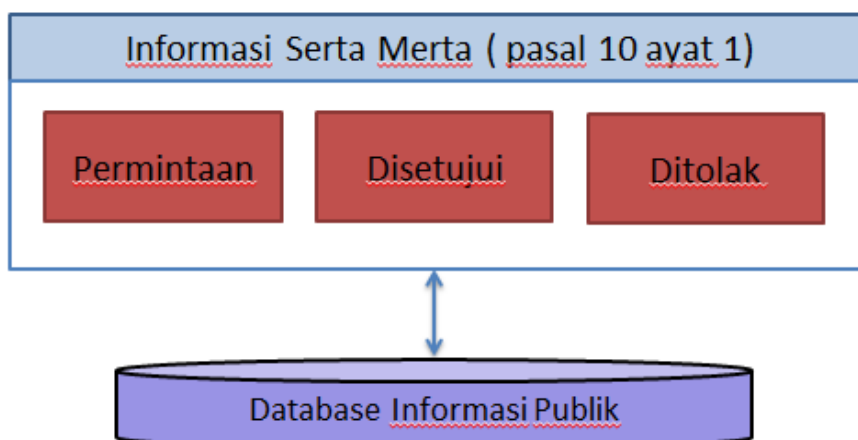
Sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

- d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut

Dengan demikian, layanan informasi publik adalah sebagai berikut :

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 5. Model Layanan Informasi Publik

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tahun pertama, maka pada tahun kedua dilakukan kegiatan lanjutan yang ditujukan untuk mewujudkan model pelayanan informasi publik dalam bentuk prototype pelayanan informasi publik berbasis TI. Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1. Perancangan prototype pelayanan informasi publik berbasis TI

Kegiatan yang dilakukan adalah merancang struktur portal yang meliputi identifikasi portal-portal yang terhubung, merancang metode hubungan / link, merancang database, merancang konten informasi, merumuskan cara akses, menghitung volume informasi. Kegiatan selanjutnya adalah membuat prototype dan merancang sistem keamanan. Prototype selanjutnya dimantapkan dalam diskusi terarah, yang hasilnya digunakan sebagai masukan dan penyempurnaan sebelum dilakukan implementasi

2. Implementasi dan verifikasi web portal pelayanan informasi publik

Kegiatan yang dilakukan adalah : sosialisasi web portal pada seluruh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, uji coba sistem, implementasi, verifikasi (FGD), penyempurnaan portal layanan informasi publik Jawa Tengah.

Dari seluruh kegiatan pada tahap ini akan dihasilkan web portal pelayanan informasi publik Jawa Tengah.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari 6 (enam) sampel website pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Kebumen yang telah di analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

4. Semua website yang ada berada pada tingkatan yang paling awal dalam *E-Government*, yakni untuk menunjukkan “wajah” pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, *E-Government* tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *E-Government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *Good Governance*.
5. Layanan situs masih bersifat informatif dan didukung dengan konten informasi yang berkualitas (akurat, terkini dan relevan)
6. Ketersediaan konten-konten informasi pada situs pemerintah berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 sebesar 43%
7. Diperlukan peningkatan layanan atau fungsi pada situs pemerintah menjadi interaktif dengan menambah konten-konten informasi publik dalam bentuk web portal agar sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7.2 Saran

Masih diperlukan diskusi dengan pengelola website Pemerintah Kabupaten/Kota beserta pihak-pihak yang berkompeten untuk kevalidan data-data yang diperoleh, sehingga bisa dilakukan tahapan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Effendi, Sofian. 2009. “Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- [2] -----, 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [3] -----, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [4] Rokhman, Ali. 2008. “Potret Dan Hambatan E-Government Indonesia”. Majalah Inovasi Vol. 11/XX/Juli 2008
- [5] Sutrisno, Ashari& Istiyanto, Jazi Eko. 2009. “Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia”. Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN “Veteran”, Yogyakarta
- [6] Banciu, Diona. 2009. “e-Romania-A Citizens’ Gateway towards Public Information”. National Institute for Research and Development in Informatics – ICI. Bucharest
- [7] Heng, Wang& Jinchang, Hou. 2010. “An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government”. Paper in Computer Science ang Information Technology IEEE International Conference, Chengdu
- [8] Chan, Lau, Pan 2008 , “*E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e- government initiatives*”
- [9] Widjajanto B., 2008, Perancangan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- [10] Widjajanto B., 2009, Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pengelolaan Pemetaan Wilayah Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan Di Jawa Tengah

LAMPIRAN 1. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

1. Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Budi Widjajanto, M.Kom.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NPP	0686.11.1997.108
5	NIDN	0618097101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 18 September 1971
7	E-mail	budipojok@yahoo.com
8	Alamat Rumah	Pondok Majapahit I Blok A/13
9	Nomor Telepon/Fax/HP	(024) 76728278 / 081325873525
10	Alamat Kantor	Jln. Nakula I No 7 – 11 Semarang
11	Nomor Telepon/Faks	(024) 3517261
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1= 80 mahasiswa
13. Mata Kuliah yang Diampu		1. Audit Sistem Informasi
		2. Manajemen Proyek
		3. Sistem Informasi Manajemen
		4. Konsep e-bisnis

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	STMIK Dian Nuswantoro Semarang	STTI Benarif Jakarta
Bidang Ilmu	Manajemen Informatika	Teknik Informatika
Tahun Masuk-Lulus	1990 – 1997	1999 - 2001
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Sistem Anggaran Jangka Menengah Sebagai Pendukung Sistem Anggaran Kota Semarang	Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pengelolaan Laboratorium Universitas Dian Nuswantoro
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Abdul Syukur	Toni HB Ongko, PhD

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2013	Web Portal Informasi Publik Jawa Tengah Sebagai Model Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat.	DIKTI	50
2	2013	Analisis Pengelolaan Database Pendukung Layanan Akademik Terintegrasi Universitas Dian Nuswantoro	LP2M UDINUS	4,5
3	2011	Analisis Pelatihan dan Edukasi Pengguna TIK (DS7) Universitas Dian Nuswantoro Berdasarkan COBIT 4.0	LP2M UDINUS	5
4	2010	Analisis Maturity Level Tata Kelola TI Universitas Dian Nuswantoro berdasarkan Domain DS dan ME COBIT 4.0	LP2M UDINUS	3,75
5	2009	Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pengelolaan Pemetaan Wilayah Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan Di Jawa Tengah	Penelitian Mandiri	-
6	2008	Perancangan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang	Penelitian Mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2007	Pelatihan Mengoperasikan Pengelolaan Informasi dalam Kegiatan Pengenalan Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kab. Purwodadi	BPKLN - DIKTI	192
2	2008	Pelatihan Pembuatan Media Presentasi dalam Pelatihan Operasional Komputer dan Internet serta Pemanfaatan ICT untuk Pendidikan bagi guru	PMPTK - DIKTI	500

	MGMP Kabupaten Wonogiri	
--	-------------------------	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pengelolaan Pemetaan Wilayah Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan Di Jawa Tengah	Techno.Com	Vol 8 / No 2 / Agustus 2009, ISSN : 1412-2693
2	Pemodelan Profil Kesra Provinsi Jawa Tengah Dengan Sistem Informasi Geografis	Prosiding	2010, ISBN : 978-602-8273-25-1
3	Percepatan Era IT Governance	Harian Umum Suara Merdeka	Mei 2010
4	PPD TI Dan Resiko Teknologi	Harian Umum Suara Merdeka	Juli 2010
5	Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Universitas XYZ Domain Monitor and Evaluate (ME) Framework Cobit 4.0	Prosiding	2011, ISBN : 979-26-0255-0

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional	Pemodelan Profil Kesra Provinsi Jawa Tengah Dengan Sistem Informasi Geografis	16 Juni 2010, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang
2	Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) 2012	Strategi Peningkatan Proses Tata Kelola Teknologi Informasi Universitas XYZ Domain Deliver and Support (DS) Framework Cobit 4.0	23 Juni 2012, Universitas Dian Nuswantoro
3	Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) 2012	Peta Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah	16 November 2013, Universitas Dian Nuswantoro

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jml. Hal.	Penerbit

H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

--	--	--	--	--

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Penghargaan	Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.

Semarang, 26 November 2013
Peneliti,



Budi Widjanto, M.Kom.
NPP. 0686.11.1997.108

2 Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NPP	0686.11.2001.266
5	NIDN	0628075602
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap, 28 Juli 1956
7	E-mail	yp@dosen.dinus.ac.id
8	Alamat Rumah	Jl. Merbau Utara Dalam I No. 64 Kecamatan Banyumanik Semarang
9	Nomor Telepon/Fax/HP	024-747-3041
10	Alamat Kantor	Jln. Nakula I No 5 – 11 Semarang
11	Nomor Telepon/Faks	024- 351-7261 Faks.024 – 356-9684
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1= 80 mahasiswa S2 = 30 mahasiswa
13. Mata Kuliah yang Diampu		1. Sinyal dan Sistem
		2. Inovasi Industri
		3. Artificial Intelligent
		4. Rangkaian Elektrik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Kristen Satya Wacana	Hokkaido University, Sapporo, Japan	Hokkaido University, Sapporo, Japan
Bidang Ilmu	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Teknik Elektro
Tahun Masuk-Lulus	1975-1981	1987-1991	1991-1994
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	"100 Watt 144 MHz NBFM Repeater for Amateur Band"	"A Study on Continuous Measurement of G/T for Direct Broadcasting Satellite Receiving Systems"	" A Yearlong Performance of Direct Broadcasting Satellite Receiving Systems"
Nama Pembimbing/Promotor	Soedigno, M.Sc.	Prof. Kiyohiko Itoh	Prof. Kiyohiko Itoh

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2007	Rekayasa Pembangunan Stasiun Lokal.	UDINUS	Rp .5 milyar

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2010	Pendidikan dan Pelatihan Pranata Komputer Tahun 2010	Sentra Diklat Kejaksaan Tinggi Jateng	28

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	" <i>Desain Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Prasarana Jalan di Kabupaten Semarang</i> "	Jurnal Teknologi Informasi CyberKU	Vol 5 / No 1 / Pebruari 2009
2	" <i>Pendekatan Partisipasif Secara Bottom Up Dalam Pemetaan Sekolah</i> "	Jurnal Teknologi Informasi CyberKU	Vol 5 / No 2 / Oktober 2009
3	" <i>Agen Cerdas Animasi Wajah Untuk Game Tebak Kata</i> "	Jurnal Teknologi Informasi CyberKU	Vol 6 / No 1 / April 2010
4	" <i>Sistem Informasi Pemetaan Sekolah Berbasis Web dengan Metode Pendekatan Partisipasif</i> "	Jurnal Teknologi Informasi CyberKU	Vol 6 / No 2 / Oktober 2010
5	" <i>Mouse Pointer Menggunakan jari Manusia Berbasis Computer Vision dengan Metode Template Matching</i> "	Jurnal Teknologi Informasi CyberKU	Vol 7 / No 1 / April 2011

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Teknologi Broadcast dan Peran Perguruan Tinggi di Era Televisi Digital	" <i>Televisi Digital Teresrial</i> "	Politeknik Negeri Ssemarang, 9 Desember 2010

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jml. Hal.	Penerbit

H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Implementasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah	2012	DPRD Jawa Tengah	Sangat Positif

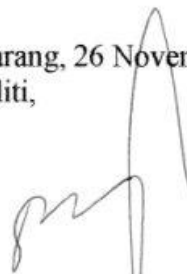
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Penghargaan	Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.

Semarang, 26 November 2013
Peneliti,



Dr. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng
NPP. 0686.11.2001.266

3. Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nova Rijati, S.Si., M.Kom.
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NPP	0686.11.1996.093
5	NIDN	0622117201
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 22 November 1972
7	E-mail	novaola@yahoo.com
8	Alamat Rumah	Jl. Bukit Limau V F4 No. 10 Semarang 50189
9	Nomor Telepon/Fax/HP	(024) 76633504 HP. 08122842442
10	Alamat Kantor	Jl. Nakula I No. 5 – 11 Semarang 50131
11	Nomor Telepon/Faks	(024) 3517261/ (024) 3520165
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = 100 orang; S2 = - orang; S3 = - orang
13. Mata Kuliah yang Diampu		1 Rekayasa Perangkat Lunak
		2 Analisa Kinerja Sistem
		3 Probabilitas dan Statistika

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	STTBI Benarif Jakarta
Bidang Ilmu	Matematika	Teknik Informatika
Tahun Masuk – Lulus	1990-1995	1999-2001
Judul Skripsi/Thesis	Dekomposisi Supermartingale Doob Meyer	Pengembangan Sistem Informasi Penjualan
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Mustafid, M.Eng, Phd.	Ir. Oon Amroni, M.Sc.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2008	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pengaduan On-Line Berbasis SMS Pada Pemerintah	LP2M UDINUS	3

		Kota Semarang		
2	2009	Pembangunan Perangkat Lunak Sistem Penilaian Instrumen Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah	LP2M UDINUS	3
3	2010	Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Matematika Diskrit dengan Metode Kooperatif Tipe STAD Berbasis TIK – Studi Kasus Pokok Bahasan Graf	LP2M UDINUS	3
4	2011	Analisis Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi UDINUS Berdasarkan Domain DS dan ME COBIT 4.0	LP2M UDINUS	5
5	2012	Analisis Pengelolaan Edukasi Dan Pelatihan Pengguna TIK (DS7) Berdasarkan Framework Cobit 4.1 Untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan Berbasis IT Pada Universitas Dian Nuswantoro Semarang	LP2M UDINUS	4.5
5	2013	Analisis Pengelolaan Database Pendukung Layanan Akademik Terintegrasi Universitas Dian Nuswantoro	LP2M UDINUS	4.5
6	2013	Web Portal Informasi Publik Jawa Tengah Sebagai Model Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat.	DIKTI	50

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2007	Pelatihan Mengoperasikan Perangkat Lunak Presentasi, dalam Kegiatan Pengenalan Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kota Salatiga	BPKLN - DIKTI	192
2	2008	Pelatihan Pembuatan Media Presentasi dalam Pelatihan Operasional Komputer dan Internet serta Pemanfaatan ICT untuk Pendidikan bagi guru MGMP Kabupaten Wonogiri	PMPTK - DIKTI	500
3	2010	Tim Pembinaan, Monitoring dan Pendampingan Pemanfaatan teknologi	PUSTEKKOM	7.5

		Informasi dan Komunikasi pada Zona Sekolah Jejaring Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010		
4	2011	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Mutimedia	UDINUS	3
5	2012	Pelatihan Pembuatan Blog Dengan Wordpress	UDINUS	3
6	2012	Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan "Buku Bicara" untuk PERTUNI Jawa Tengah	PERTUNI	10
7	2013	IbM Warga Kelurahan Kebangarum Semarrang	UDINUS	3

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Metode Analytic Hierarchy Process dalam Penentuan Keputusan Pemilihan Tipe Rumah (Studi Kasus di Perumahan Bukit Permata Puri Semarang)	Techno.com	Vol. 8 No. 2, Agustus 2009, ISSN : 1412-2693
2	Rancang Bangun Aplikasi e-Learning Sebagai Model Proses Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	Techno.com	Vol. 8 No. 3, November 2009, ISSN : 1412-2693
3	Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Matematika Diskrit dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (Studi Kasus : Pokok Bahasan Graf)	Techno.Science	Vol.3 No. 2 Oktober 2009, ISSN : 1978-9793
4	Perangkat Lunak Simulasi Penilaian Instrumen Akreditasi SMA/MA	Prosiding	2010, ISSN : 1979-2328
5	Piranti Lunak Penilaian Kegiatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya	Prosiding	2010, ISBN : 978-602-8273-25-1
6	Pemodelan Profil Kesra Prov. Jawa Tengah dengan Sistem Informasi Geografis	Prosiding	2010, ISBN: 978-602-8273-25-1
7	Perancangan Decision Support System dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarki Process untuk Menentukan Kredit Risk Scoring Bagi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat	Prosiding	2011, ISBN : 979-26-0255-0
8	Strategi Peningkatan Proses Tata	Prosiding	2011, ISBN : 979-26-0255-0

	Kelola Teknologi Informasi Universitas XYZ Domain Deliver and Support (DS) Framework Cobit 4.0		
9	Peta Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah	Prosiding	2013, ISBN: 979-26-0266-6

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Teknik Informatika FTI UPN Veteran Yogyakarta	Perangkat Lunak Simulasi Penilaian Instrumen Akreditasi SMA/MA	22 Mei 2010, Teknik Informatika FTI UPN Veteran Yogyakarta
2	Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2010 :	Piranti Lunak Penilaian Kegiatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya	16 Juni 2010, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang
3	Seminar Jurnal Techno Science : Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Manufaktur	Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Matematika Diskrit dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (Studi Kasus : Pokok Bahasan Graf)	Oktober 2010, Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro
4	Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) 2011	Perancangan Decision Support System dengan Menggunakan Metode Analytical Herarkhi Process untuk Menentukan Kredit Risk Scoring Bagi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat	16 April 2011, Universitas Dian Nuswantoro
5	Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) 2012	Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Universitas XYZ Domain Monitor and Evaluate (ME) Framework Cobit 4.0	23 Juni 2012, Universitas Dian Nuswantoro

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	No P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik. Rekayasa Sosial lainnya dalam 5 tahun terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Sosial, Institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Hibah Bersaing.

Semarang, 26 November 2013

Peneliti,



Nova Rijati, S.Si., M.Kom.

NPP.0686.11.1996.093